



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.12, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. SDA. Kehutanan.
2007 – 2009.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07/PMK.07/2011**

TENTANG

**ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA
ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2007, TAHUN ANGGARAN
2008, DAN TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DIALOKASIKAN DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 untuk provinsi dan kabupaten/kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2003, Tahun Anggaran 2007, dan Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2007 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2007, TAHUN ANGGARAN 2008, DAN TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

- (1) Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Kehutanan yang belum dibagikan kepada provinsi dan kabupaten/kota pada tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp31.296.227.000,00

(tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) sebesar Rp21.650.738.038,00 (dua puluh satu miliar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh delapan rupiah);
 - b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp3.933.663.853,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah); dan
 - c. Dana Reboisasi sebesar (DR) Rp5.711.825.109,00 (lima miliar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Rincian alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

- (1) Penyaluran alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan sekaligus dalam Tahun Anggaran 2011 dengan memperhitungkan kelebihan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Tata cara penyaluran alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W.MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2007, TAHUN ANGGARAN 2008, DAN TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2007, TAHUN ANGGARAN 2008, DAN TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011

(dalam rupiah)

No	Daerah	DBH SDA Kehutanan			Jumlah
		IIUPH	PSDH	DR	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	-	20.301.425	3.284.640	23.586.065
1	Kab. Aceh Barat	-	1.604.375	-	1.604.375
2	Kab. Aceh Besar	-	369.117	-	369.117
3	Kab. Aceh Selatan	-	369.117	-	369.117
4	Kab. Aceh Singkil	-	369.117	-	369.117
5	Kab. Aceh Tengah	-	2.484.267	3.284.640	5.768.907
6	Kab. Aceh Tenggara	-	369.117	-	369.117
7	Kab. Aceh Timur	-	369.117	-	369.117
8	Kab. Aceh Utara	-	369.117	-	369.117
9	Kab. Bireun	-	369.117	-	369.117
10	Kab. Aceh Pidie	-	369.117	-	369.117
11	Kab. Simeulue	-	4.413.946	-	4.413.946
12	Kota Banda Aceh	-	369.117	-	369.117
13	Kota Sabang	-	369.117	-	369.117
14	Kota Langsa	-	369.117	-	369.117
15	Kota Lhokseumawe	-	369.117	-	369.117
16	Kab. Nagan Raya	-	369.117	-	369.117
17	Kab. Aceh Jaya	-	596.225	-	596.225
18	Kab. Aceh Barat Daya	-	369.117	-	369.117
19	Kab. Gayo Lues	-	369.117	-	369.117
20	Kab. Aceh Tamiang	-	369.117	-	369.117
21	Kab. Bener Meriah	-	498.222	-	498.222
22	Kab. Pidie Jaya	-	369.117	-	369.117

No	Daerah	DBH SDA Kehutanan			Jumlah
		IIUPH	PSDH	DR	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
23	Kota Subulussalam	-	369.117	-	369.117
24	Bagian Provinsi NAD	-	4.060.284	-	4.060.284
	Provinsi Jambi	-	-	456.482.561	456.482.561
1	Kab. Batanghari	-	-	-	-
2	Kab. Bungo	-	-	-	-
3	Kab. Kerinci	-	-	-	-
4	Kab. Merangin	-	-	-	-
5	Kab. Muaro Jambi	-	-	-	-
6	Kab. Sarolangun	-	-	-	-
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	-	-	-
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	-	-	-
9	Kab. Tebo	-	-	456.482.561	456.482.561
10	Kota Jambi	-	-	-	-
11	Kab. Sungai Penuh	-	-	-	-
12	Bagian Provinsi Jambi	-	-	-	-
	Provinsi Bengkulu	1.428.623.999	31.778.729	33.321.318	1.493.724.046
1	Kab. Bengkulu Selatan	-	1.412.388	-	1.412.388
2	Kab. Bengkulu Utara	1.065.182.054	1.412.388	-	1.066.594.442
3	Kab. Rejang Lebong	-	1.412.388	-	1.412.388
4	Kota Bengkulu	-	1.412.388	-	1.412.388
5	Kab. Kaur	-	1.412.388	-	1.412.388
6	Kab. Seluma	-	2.816.394	-	2.816.394
7	Kab. Mukomuko	77.717.145	11.307.485	33.321.318	122.345.948
8	Kab. Lebong	-	1.412.388	-	1.412.388
9	Kab. Kepahiang	-	1.412.388	-	1.412.388
10	Kab. Bengkulu Tengah	-	1.412.388	-	1.412.388
11	Bagian Provinsi Bengkulu	285.724.800	6.355.746	-	292.080.546
	Provinsi Jawa Timur	-	76.118.907	-	76.118.907
1	Kab. Bangkalan	-	822.907	-	822.907
2	Kab. Banyuwangi	-	822.907	-	822.907

No	Daerah	DBH SDA Kehutanan			Jumlah
		IIUPH	PSDH	DR	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
3	Kab. Blitar	-	822.907	-	822.907
4	Kab. Bojonegoro	-	5.485.069	-	5.485.069
5	Kab. Bondowoso	-	822.907	-	822.907
6	Kab. Gresik	-	822.907	-	822.907
7	Kab. Jember	-	822.907	-	822.907
8	Kab. Jombang	-	822.907	-	822.907
9	Kab. Kediri	-	822.907	-	822.907
10	Kab. Lamongan	-	822.907	-	822.907
11	Kab. Lumajang	-	822.907	-	822.907
12	Kab. Madiun	-	19.831.080	-	19.831.080
13	Kab. Magetan	-	822.907	-	822.907
14	Kab. Malang	-	822.907	-	822.907
15	Kab. Mojokerto	-	822.907	-	822.907
16	Kab. Nganjuk	-	822.907	-	822.907
17	Kab. Ngawi	-	822.907	-	822.907
18	Kab. Pacitan	-	822.907	-	822.907
19	Kab. Pamekasan	-	939.368	-	939.368
20	Kab. Pasuruan	-	822.907	-	822.907
21	Kab. Ponorogo	-	822.907	-	822.907
22	Kab. Probolinggo	-	822.907	-	822.907
23	Kab. Sampang	-	822.907	-	822.907
24	Kab. Sidoarjo	-	822.907	-	822.907
25	Kab. Situbondo	-	962.033	-	962.033
26	Kab. Sumenep	-	822.907	-	822.907
27	Kab. Trenggalek	-	830.192	-	830.192
28	Kab. Tuban	-	6.453.073	-	6.453.073
29	Kab. Tulungagung	-	822.907	-	822.907
30	Kota Blitar	-	822.907	-	822.907
31	Kota Kediri	-	822.907	-	822.907
32	Kota Madiun	-	822.907	-	822.907
33	Kota Malang	-	822.907	-	822.907
34	Kota Mojokerto	-	822.907	-	822.907
35	Kota Pasuruan	-	822.907	-	822.907
36	Kota Probolinggo	-	822.907	-	822.907
37	Kota Surabaya	-	822.907	-	822.907
38	Kota Batu	-	884.192	-	884.192
39	Bagian Provinsi Jatim	-	15.223.783	-	15.223.783

No	Daerah	DBH SDA Kehutanan			Jumlah
		IIUPH	PSDH	DR	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
	Provinsi Kalimantan Barat	3.001.166.040	1.668.171.037	1.109.783.227	5.779.120.304
1	Kab. Bengkayang	-	55.605.701	-	55.605.701
2	Kab. Landak	-	61.544.093	21.668.320	83.212.413
3	Kab. Kapuas Hulu	-	55.605.701	221.215.859	276.821.560
4	Kab. Ketapang	92.726.560	120.654.606	339.468.560	552.849.726
5	Kab. Pontianak	-	56.791.941	-	56.791.941
6	Kab. Sambas	-	58.948.528	-	58.948.528
7	Kab. Sanggau	-	62.671.261	-	62.671.261
8	Kab. Sintang	966.240.000	408.983.452	175.685.120	1.550.908.572
9	Kota Pontianak	-	55.876.741	-	55.876.741
10	Kota Singkawang	-	55.605.701	-	55.605.701
11	Kab. Sekadau	-	55.605.701	351.745.368	407.351.069
12	Kab. Melawi	36.606.272	231.037.702	-	267.643.974
13	Kab. Kayong Utara	-	55.605.701	-	55.605.701
14	Kab. Kubu Raya	1.305.360.000	-	-	1.305.360.000
15	Bagian Provinsi Kalbar	600.233.208	333.634.208	-	933.867.416
	Provinsi Kalimantan Tengah	9.611.087.999	50.397.492	318.566.464	9.980.051.955
1	Kab. Barito Selatan	-	1.550.692	-	1.550.692
2	Kab. Barito Utara	-	6.874.370	117.479.316	124.353.686
3	Kab. Kapuas	-	1.550.692	-	1.550.692
4	Kab. Kotawaringin Barat	9.158.400	1.550.692	-	10.709.092
5	Kab. Kotawaringin Timur	-	1.550.692	-	1.550.692
6	Kota Palangkaraya	-	1.550.692	-	1.550.692
7	Kab. Barito Timur	-	1.550.692	-	1.550.692
8	Kab. Murung Raya	192.000.000	1.550.692	-	193.550.692
9	Kab. Pulang Pisau	-	1.550.692	-	1.550.692
10	Kab. Gunung Mas	93.980.448	1.550.692	-	95.531.140
11	Kab. Lamandau	248.057.600	1.550.692	-	249.608.292
12	Kab. Sukamara	-	1.550.692	-	1.550.692
13	Kab. Katingan	2.867.540.499	14.835.319	112.056.818	2.994.432.636

No	Daerah	DBH SDA Kehutanan			Jumlah
		IIUPH	PSDH	DR	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
14	Kab. Seruyan	4.278.133.452	1.550.692	89.030.330	4.368.714.474
15	Bagian Provinsi Kalteng	1.922.217.600	10.079.499	-	1.932.297.099
	Provinsi Kalimantan Selatan	-	25.265.736	27.481.347	52.747.083
1	Kab. Banjar	-	842.191	-	842.191
2	Kab. Barito Kuala	-	842.191	7.162.000	8.004.191
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	842.191	-	842.191
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	842.191	-	842.191
5	Kab. Hulu Sungai Utara	-	842.191	-	842.191
6	Kab. Kota Baru	-	6.944.946	-	6.944.946
7	Kab. Tabalong	-	842.191	-	842.191
8	Kab. Tanah Laut	-	4.003.541	-	4.003.541
9	Kab. Tapin	-	842.191	-	842.191
10	Kota Banjar Baru	-	842.191	-	842.191
11	Kota Banjarmasin	-	842.191	-	842.191
12	Kab. Balangan	-	842.191	20.319.347	21.161.538
13	Kab. Tanah Bumbu	-	842.191	-	842.191
14	Bagian Provinsi Kalsel	-	5.053.148	-	5.053.148
	Provinsi Kalimantan Timur	7.609.860.000	1.309.337.447	3.513.158.801	12.432.356.248
1	Kab. Berau	1.845.360.000	43.644.581	-	1.889.004.581
2	Kab. Bulungan	-	43.644.581	-	43.644.581
3	Kab. Kutai Kartanegara	-	43.644.581	-	43.644.581
4	Kab. Kutai Barat	-	233.117.600	2.003.115.374	2.236.232.974
5	Kab. Kutai Timur	1.794.528.000	44.550.792	176.276.747	2.015.355.539
6	Kab. Malinau	2.448.000.000	333.355.754	1.333.766.680	4.115.122.434
7	Kab. Nunukan	-	43.644.581	-	43.644.581
8	Kab. Paser	-	43.644.581	-	43.644.581

No	Daerah	DBH SDA Kehutanan			Jumlah
		IIUPH	PSDH	DR	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
9	Kota Balikpapan	-	43.644.581	-	43.644.581
10	Kota Bontang	-	43.644.581	-	43.644.581
11	Kota Samarinda	-	43.644.581	-	43.644.581
12	Kota Tarakan	-	43.644.581	-	43.644.581
13	Kab. Penajam Paser Utara	-	43.644.581	-	43.644.581
14	Kab. Tana Tidung	-	-	-	-
15	Bagian Provinsi Kaltim	1.521.972.000	261.867.491	-	1.783.839.491
	Provinsi Sulawesi Selatan	-	10.840.808	-	10.840.808
1	Kab. Bantaeng	-	188.536	-	188.536
2	Kab. Barru	-	188.536	-	188.536
3	Kab. Bone	-	188.536	-	188.536
4	Kab. Bulukumba	-	188.536	-	188.536
5	Kab. Enrekang	-	4.336.320	-	4.336.320
6	Kab. G o w a	-	188.536	-	188.536
7	Kab. Jeneponto	-	188.536	-	188.536
8	Kab. Luwu	-	188.536	-	188.536
9	Kab. Luwu Utara	-	188.536	-	188.536
10	Kab. M a r o s	-	188.536	-	188.536
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	-	188.536	-	188.536
12	Kab. Pinrang	-	188.536	-	188.536
13	Kab. Selayar	-	188.536	-	188.536
14	Kab. Sidenreng Rappang	-	188.536	-	188.536
15	Kab. Sinjai	-	188.536	-	188.536
16	Kab. Soppeng	-	188.536	-	188.536
17	Kab. Takalar	-	188.536	-	188.536
18	Kab. Tana Toraja	-	188.536	-	188.536
19	Kab. Wajo	-	188.536	-	188.536
20	Kota Pare-pare	-	188.536	-	188.536
21	Kota Makassar	-	188.536	-	188.536
22	Kota Palopo	-	188.536	-	188.536
23	Kab. Luwu Timur	-	188.536	-	188.536

No	Daerah	DBH SDA Kehutanan			Jumlah
		IIUPH	PSDH	DR	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
24	Kab. Toraja Utara	-	188.536	-	188.536
25	Bagian Provinsi Sulsel	-	2.168.160	-	2.168.160
	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	120.009.236	-	120.009.236
1	Kab. Buton	-	4.363.972	-	4.363.972
2	Kab. Konawe	-	4.363.972	-	4.363.972
3	Kab. Kolaka	-	4.363.972	-	4.363.972
4	Kab. Muna	-	4.363.972	-	4.363.972
5	Kota Kendari	-	4.363.972	-	4.363.972
6	Kota Bau-bau	-	4.363.972	-	4.363.972
7	Kab. Konawe Selatan	-	4.363.972	-	4.363.972
8	Kab. Bombana	-	4.363.972	-	4.363.972
9	Kab. Wakatobi	-	4.363.972	-	4.363.972
10	Kab. Kolaka Utara	-	48.003.696	-	48.003.696
11	Kab. Konawe Utara	-	4.363.972	-	4.363.972
12	Kab. Buton Utara	-	4.363.972	-	4.363.972
13	Bagian Provinsi Sultra	-	24.001.848	-	24.001.848
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	36.589.320	66.912.719	103.502.039
1	Kab. Bima	-	14.635.728	66.912.719	81.548.447
2	Kab. Dompu	-	1.829.466	-	1.829.466
3	Kab. Lombok Barat	-	1.829.466	-	1.829.466
4	Kab. Lombok Tengah	-	1.829.466	-	1.829.466
5	Kab. Lombok Timur	-	1.829.466	-	1.829.466
6	Kab. Sumbawa	-	1.829.466	-	1.829.466
7	Kota Mataram	-	1.829.466	-	1.829.466
8	Kota Bima	-	1.829.466	-	1.829.466
9	Kab. Sumbawa Barat	-	1.829.466	-	1.829.466
10	Kab. Lombok Utara	-	-	-	-
11	Bagian Provinsi NTB	-	7.317.864	-	7.317.864
	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	96.502.671	-	96.502.671
1	Kab. Alor	-	16.522.356	-	16.522.356
2	Kab. Belu	-	2.039.404	-	2.039.404

No	Daerah	DBH SDA Kehutanan			Jumlah
		IIUPH	PSDH	DR	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
3	Kab. Ende	-	15.883.165	-	15.883.165
4	Kab. Flores Timur	-	5.116.653	-	5.116.653
5	Kab. Kupang	-	2.039.404	-	2.039.404
6	Kab. Lembata	-	2.039.404	-	2.039.404
7	Kab. Manggarai	-	2.039.404	-	2.039.404
8	Kab. Ngada	-	2.039.404	-	2.039.404
9	Kab. Sikka	-	4.548.732	-	4.548.732
10	Kab. Sumba Barat	-	2.039.404	-	2.039.404
11	Kab. Sumba Timur	-	4.687.778	-	4.687.778
12	Kab. Timor Tengah Selatan	-	2.039.404	-	2.039.404
13	Kab. Timor Tengah Utara	-	2.039.404	-	2.039.404
14	Kota Kupang	-	2.039.404	-	2.039.404
15	Kab. Rote Ndao	-	2.039.404	-	2.039.404
16	Kab. Manggarai Barat	-	2.039.404	-	2.039.404
17	Kab. Nagekeo	-	2.039.404	-	2.039.404
18	Kab. Sumba Barat Daya	-	2.039.404	-	2.039.404
19	Kab. Sumba Tengah	-	2.039.404	-	2.039.404
20	Kab. Manggarai Timur	-	1.891.796	-	1.891.796
21	Kab. Sabu Raijua	-	-	-	-
22	Bagian Provinsi NTT	-	19.300.535	-	19.300.535
	Provinsi Papua	-	488.351.045	182.834.032	671.185.077
1	Kab. Biak Numfor	-	8.110.279	-	8.110.279
2	Kab. Jayapura	-	57.278.568	182.834.032	240.112.600
3	Kab. Jayawijaya	-	8.110.279	-	8.110.279
4	Kab. Merauke	-	8.110.279	-	8.110.279
5	Kab. Mimika	-	8.110.279	-	8.110.279
6	Kab. Nabire	-	8.110.279	-	8.110.279
7	Kab. Paniai	-	8.110.279	-	8.110.279
8	Kab. Puncak Jaya	-	8.110.279	-	8.110.279
9	Kab. Yapen Waropen	-	8.110.279	-	8.110.279
10	Kota Jayapura	-	8.110.279	-	8.110.279
11	Kab. Sarmi	-	8.110.279	-	8.110.279
12	Kab. Keerom	-	8.110.279	-	8.110.279
13	Kab. Yahukimo	-	8.110.279	-	8.110.279

No	Daerah	DBH SDA Kehutanan			Jumlah
		IIUPH	PSDH	DR	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
14	Kab. Pegunungan Bintang	-	8.110.279	-	8.110.279
15	Kab. Tolikara	-	8.110.279	-	8.110.279
16	Kab. Boven Digoel	-	8.110.279	-	8.110.279
17	Kab. Mappi	-	8.110.279	-	8.110.279
18	Kab. Asmat	-	146.172.125	-	146.172.125
19	Kab. Waropen	-	8.110.279	-	8.110.279
20	Kab. Supiori	-	8.110.279	-	8.110.279
21	Kab. Mamberamo Raya	-	8.110.279	-	8.110.279
22	Kab. Mamberamo Tengah	-	5.522.474	-	5.522.474
23	Kab. Yalimo	-	5.522.474	-	5.522.474
24	Kab. Lanny Jaya	-	5.522.474	-	5.522.474
25	Kab. Nduga	-	5.522.474	-	5.522.474
26	Kab. Puncak	-	5.522.474	-	5.522.474
27	Kab. Dogiyai	-	5.522.474	-	5.522.474
28	Kab. Intan Jaya	-	-	-	-
29	Kab. Deiyai	-	-	-	-
30	Bagian Provinsi Papua	-	97.670.207	-	97.670.207
TOTAL NASIONAL		21.650.738.038	3.933.663.853	5.711.825.109	31.296.227.000

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO